



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
Jalan Willem AS Nomor 5 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 3227866 Faks. (0536) 3224200, email: dtphp@kalteng.go.id

**PENGUMUMAN PERSIAPAN PEMILIHAN
METODE E-PURCHASING
PAKET PEKERJAAN
BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH MENDUKUNG QUICK WIN
EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH
LUAS 9.695,71 HA DI KECAMATAN KAPUAS MURUNG DAN KAPUAS
BARAT, KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

Nomor : 23/CS/PPK/Satker-08/ I/2025

Sehubungan dengan akan dilaksanakan proses pemilihan penyedia paket pekerjaan **BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH MENDUKUNG QUICK WIN EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 9.695.71 HA DI KECAMATAN KAPUAS MURUNG DAN KAPUAS BARAT, KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH** melalui e-purchasing, katalog elektronik konstruksi menggunakan **katalog sektoral Kementerian Pertanian dengan etalase Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian**, yang terdiri dari 3 (tiga) paket pekerjaan, dengan total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) **Rp. 245.175.725.316,00** (Dua Ratus Empat Puluh Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah). Dengan ini kami mengundang pelaku usaha yang **memenuhi persyaratan** untuk dapat menayangkan jenis pekerjaan konstruksi cetak sawah dalam katalog sektoral Kementerian Pertanian Etalase Sarana dan Prasarana.

Bersama ini disampaikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) (terlampir).

Palangka Raya, 24 Januari 2025

Pejabat Pembuat Komitmen,


NIP. 19760410 200501 2 011
WALYITA ROBINA, STP

Lampiran 1. Kerangka Acuan Kerja



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KUASA PENGGUNA : IR. HJ. SUNARTI, MM ANGGARAN (KPA)

**PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN (PPK)** : FAHLITA ROBINA, S.TP

SATKER : DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH TUGAS PEMBANTUAN (08) TAHUN
ANGGARAN 2025

PROGRAM : PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN
KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS

KEGIATAN : CETAK SAWAH QUICK WIN

NAMA PEKERJAAN : BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH
MENDUKUNG QUICK WIN EKSTENSIFIKASI
CETAK SAWAH LUAS 9.695,71 HA DI
KECAMATAN KAPUAS MURUNG DAN KAPUAS
BARAT, KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

LOKASI : KALIMANTAN TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA
KONSTRUKSI CETAK SAWAH
MENDUKUNG QUICK WIN EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 9.695,71 HA
DI KECAMATAN KAPUAS MURUNG DAN KAPUAS BARAT, KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- f. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- i. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- j. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

- m. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- n. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
- o. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
- p. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
- q. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
- r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021;
- s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- t. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
- u. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
- v. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
- w. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- x. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya

Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

- y. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
- z. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025;
 - aa. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3426/KPTS/RC.010/A/10/2024 tentang Pedoman Umum Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi;
 - bb. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 63/KPTS/RC.200/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PSP TA. 2025.

2. Gambaran Umum

Kebijakan pengembangan pertanian nasional difokuskan pada terwujudnya peningkatan produksi pangan dan ketersediaan stok pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Kementerian Pertanian didukung oleh *stakeholders* dan K/L terkait bertanggungjawab penuh untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Peran penting menjaga ketersediaan pangan nasional merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Penyediaan pangan tersebut terutama yang berasal dari produksi dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman, dan terjangkau. Diperlukan berbagai strategi dan terobosan yang tepat untuk dapat mewujudkan ketersediaan pangan nasional yang cukup dan tangguh.

Paradigma pertanian untuk pembangunan (*agriculture for development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, institusional dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multi fungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyediaan sarana dan prasarana pertanian.

Seiring dengan dinamika pertumbuhan pembangunan di segala bidang terutama industri dan pemukiman sangat berpengaruh negatif terhadap pengembangan sektor pertanian khususnya produksi padi, karena menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian khususnya lahan sawah menjadi lahan non pertanian. Hal ini akan mengancam kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, maka upaya untuk memperluas baku lahan sawah menjadi sangat penting. Perluasan lahan baku sawah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya lahan dan air yang ada serta pemberdayaan petani guna meningkatkan kesejahteraan petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Penambahan luas baku lahan sawah, salah satunya dapat dilaksanakan melalui kegiatan cetak sawah sebagai terobosan peningkatan produksi pangan serta stok cadangan pangan Nasional. Kegiatan cetak sawah secara teknis dimulai dari identifikasi calon petani dan calon lokasi (CP-CL), survey dan investigasi, desain, penetapan lokasi dan petani, penyiapan dokumen lingkungan, pelaksanaan konstruksi cetak sawah, pengolahan lahan dan pemanfaatannya. Agar pelaksanaan kegiatan cetak sawah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan maka disusun Kerangka Acuan Kerja ini sebagai acuan umum bagi aparat dan Dinas baik di Pusat maupun Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan cetak sawah dalam rangka penyediaan lahan pertanian untuk budi daya padi dan peningkatan produksi padi nasional; dan
- b. Agar diperoleh pemahaman yang sama dalam melaksanakan kegiatan cetak sawah baik oleh petugas maupun pelaksana.

2. Tujuan

- a. Untuk memberikan arahan yang jelas tentang tata cara pelaksanaan kegiatan cetak sawah agar berjalan secara tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran; dan
- b. Menyediakan lahan sawah baru untuk budi daya padi.

3. Sasaran

- a. Tersedianya tata cara pelaksanaan kegiatan cetak sawah dengan tertib, efektif, efisien dan akuntabel; dan
- b. Tersedianya lahan sawah baru siap tanam untuk budi daya padi.

C. Lokasi Pekerjaan

Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025 akan dilakukan di Kecamatan Kapuas Murung dan Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Sumber Pendanaan

Biaya yang diperlukan untuk Pembiayaan kegiatan Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025 ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2025 No. DIPA-018.08-0/2025 tanggal 2 Desember 2024 pada Akun Belanja Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah.

E. Nilai Pekerjaan

Total nilai pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Cetak Sawah Mendukung Quick Win Ekstensifikasi Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari 3 (tiga) paket di Kabupaten Kapuas Kecamatan Kapuas Murung dan Kapuas Barat adalah sebesar Rp. 245.175.725.316,00 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah) termasuk pajak yang harus dibayarkan untuk pelaksanaan, dengan rician sebagai berikut:

Paket	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas (ha)	Nilai HPS (Rp.)
1	Kapuas	Kapuas Murung	Palingkau Baru	6.120,62	153.292.209.670,98
			Palingkau Lama		
			Bina Sejahtera		
			Rawa Subur		
			Bina Karya		
			Saka Binjai		
2	Kapuas	Kapuas Murung	Sumber Mulya	2.104,94	54.961.784.432,24
			Bina Mekar		
3	Kapuas	Kapuas Barat	Sei Kayu	1.470,15	36.921.731.212,83
Total				9695,71	245.175.725.316,06

F. Nama dan Organisasi KPA

Nama Pejabat KPA : Ir. Hj. Sunarti, MM

Satuan Kerja : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah (149120)

G. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Pejabat PPK : Fahlita Robina, STP
Satuan Kerja : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah (149120)

H. Persyaratan Kualifikasi Calon Penyedia

1. Persyaratan Kualifikasi, Administrasi dan legalitas

a. Nomor Induk Berusaha

Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020 atau Nomor Induk Berusaha NIB dan SBU yang masih berlaku untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 42930 Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, KBLI 42201 Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, KBLI 42911 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, KBLI 43909 Konstruksi Khusus lainnya.

b. Sertifikat Badan Usaha

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil Kecil/Menengah/Besar, serta disyaratkan sub bidang SBU KBLI 42930 Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, KBLI 42201 Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, KBLI 42911 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, KBLI 43909 Konstruksi Khusus lainnya.

c. Akta Pendirian Perusahaan

Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan).

d. Tidak masuk dalam Daftar Hitam

e. Pengalaman

Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

f. Nomor Pokok Wajib Pajak

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak valid.

2. Persyaratan Personil

a. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bidang Irigasi

Memiliki 1 (satu) orang tenaga pelaksana lapangan yang memiliki Sertifikat Kompetensi Bidang Irigasi dengan kualifikasi Pelaksana Lapangan Pekerjaan

Bidang Irigasi dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun.

b. Petugas K3

Memiliki 1 (satu) orang petugas keselamatan kerja yang memiliki Sertifikat Kompetensi Bidang Irigasi dengan kualifikasi Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi dengan pengalaman minimal 0 (nol) tahun.

c. Tenaga Pendukung

1. Surveyor
2. Drafter
3. Tenaga administrasi

3. Persyaratan Peralatan

Peralatan utama

- a) Excavator kelas sedang
- b) Traktor roda 4
- c) Traktor roda 2

4. Pemilihan Penyedia

a. Metoda Pemilihan

Metode Pemilihan penyedia dilaksanakan melalui e-purchasing pada etalase e-katalog sektoral Kementerian Pertanian dengan etalase Sarana dan Prasarana menggunakan Negosiasi Harga dengan mempertimbangkan:

1. Kesesuaian dengan spesifikasi teknis (personil, peralatan, bahan konstruksi, metode pelaksanaan dan Rencana Keselamatan Konstruksi);
2. Kesesuaian nilai TKDN;
3. Kesesuaian kualifikasi penyedia
4. Referensi harga terbaik.

b. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi dan Teknis

Untuk proses evaluasi dan klarifikasi calon penyedia jasa akan dilakukan secara administratif dan kemampuan aktual calon penyedia jasa di lapangan. Aspek-aspek yang akan dievaluasi pada saat evaluasi administrasi antara lain:

1. Kesesuaian dan kelengkapan dokumen Perusahaan yang ditampilkan dalam SIKAP;
2. Status daftar hitam penyedia;
3. Kualifikasi Perusahaan;
4. Perhitungan Nilai TKDN Pekerjaan (*Self Declare*);

5. Kesesuaian spesifikasi material/bahan dan item pekerjaan berkaitan dengan jenis/tipe, kualitas dan merk (bila dipersyaratkan untuk item pekerjaan tertentu);
6. Kesesuaian Pengalaman Kinerja Penyedia sesuai yang disyaratkan dalam spesifikasi;
7. Kesesuaian Personel Manajerial dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi;
8. Kesesuaian Peralatan Utama dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi;
9. Evaluasi komponen pembentuk harga satuan pekerjaan konstruksi dan Referensi harga terbaik.

c. Pembuktian Aktual Calon Penyedia Jasa

Aspek yang akan dievaluasi pada saat evaluasi kemampuan aktual calon penyedia jasa, antara lain:

1. Kesesuaian serta pengecekan peralatan-peralatan yang disyaratkan pada saat evaluasi lapangan dan/atau dokumen yang disampaikan oleh penyedia;
2. Kesesuaian bahan material sesuai spesifikasi, pembuktian/klarifikasi dokumen-dokumen yang disampaikan pada saat evaluasi administrasi;
3. Kesesuaian personel yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.

5. Kelengkapan dan spesifikasi produk

Penyedia diharapkan dapat menayangkan spesifikasi produk secara lengkap pada data produk seperti jenis material, tipe, jenis dan/atau warna (bila diperlukan).

Ketentuan urutan pada penilaian kelengkapan dan spesifikasi produk antara lain:

- a. Kelengkapan produk;
- b. Kesesuaian spesifikasi produk;
- c. Kelengkapan data spesifikasi produk;
- d. Nilai total TKDN.

Bila setelah dilaksanakan penilaian dan penyedia terpilih tidak menayangkan secara lengkap spesifikasi suatu produk, maka spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi jenis pekerjaan ini dan akan dikonfirmasi pada acara verifikasi spesifikasi teknis jenis pekerjaan.

6. Batas waktu *input* produk

Pengumuman akan dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025. Kepada calon penyedia diharapkan dapat menginput produk pada etalase sektoral Kementerian Pertanian mulai tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025. Rencana pengadaan akan dilakukan pada tanggal 31 Januari 2025.

Adapun produk yang ditayangkan dan/atau mengalami revisi setelah tanggal

tersebut di atas tidak akan diproses/dilakukan penilaian pada acara penilaian kesesuaian dan kelengkapan produk penyedia.

I. Lingkup Pekerjaan

1) Pekerjaan Persiapan

Pelaksana pekerjaan wajib mempelajari, memeriksa dokumen rencana kegiatan (gambar pelaksanaan, jenis pekerjaan, dan dokumen perencanaan lainnya), menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk kurva S disampaikan ke PPK pada saat PCM (*pre construction meeting*).

Kegiatan/aktivitas yang harus dilakukan pada tahap ini yaitu:

a. Mobilisasi dan Demobilisasi

Penyedia jasa wajib melakukan pengadaan dan persiapan alat, pengangkutan alat, pemasangan alat dan pengaturan logistik dalam rangka mobilisasi alat. Serta melakukan pembongkaran alat, pengangkutan kembali, pemeriksaan dan pemeliharaan alat, dokumentasi dalam rangka demobilisasi alat. Alat yang dimaksud terdiri dari excavator, alat/mesin untuk perataan tanah, alat perbengkelan lapangan, alat bantu kerja, dll.

Pekerjaan mobilisasi alat:

- Memastikan semua alat yang diperlukan tersedia, dalam kondisi baik dan siap dioperasikan.
- Mengatur transportasi alat dari lokasi penyimpanan ke lokasi proyek.
- Menyiapkan, menempatkan dan memasang alat di lokasi yang ditentukan, termasuk pengujian fungsionalitas.
- Mengelola jadwal dan logistik untuk meminimalkan waktu tunggu dan memastikan alat siap digunakan sesuai rencana.

Pekerjaan demobilisasi alat:

- Membongkar dan membersihkan alat yang sudah tidak digunakan dari lokasi proyek.
- Mengatur transportasi alat kembali ke lokasi penyimpanan atau lokasi lain yang ditentukan.
- Melakukan inspeksi dan pemeliharaan alat setelah digunakan untuk memastikan alat tetap dalam kondisi baik.
- Menyusun laporan tentang kondisi alat dan kegiatan mobilisasi dan demobilisasi untuk keperluan administrasi dan audit.

b. Stake out trase saluran/infrastruktur di lapangan

Penyedia jasa wajib melakukan persiapan berupa pengumpulan data proyek,

- menyusun rencana *stake out* untuk menentukan jalur atau *trase* saluran/infrastruktur serta pengukuran rencana infrastruktur di lapangan.

Persiapan:

- Mengumpulkan informasi terkait rencana desain, gambar teknik, dan spesifikasi proyek.
- Melakukan survei lapangan untuk memahami kondisi topografi dan geologi area yang akan dikembangkan dan area pekerjaan.

Pembuatan rencana *stake out*:

- Menyusun rencana *stake out* berdasarkan data yang dikumpulkan untuk menentukan jalur atau *trase* saluran/infrastruktur.
- Menetapkan titik acuan dan *benchmark* yang akan digunakan dalam proses *stake out*.

Pelaksanaan *stake out*:

- Menggunakan alat ukur (seperti total station, GPS, atau theodolite) untuk mentransfer rencana ke lapangan.
- Memasang patok atau tanda di lokasi-lokasi penting untuk menunjukkan batas *trase* saluran dan elemen-infrastruktur lainnya.
- Memastikan bahwa semua titik dan garis yang ditandai sesuai dengan rencana dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Dokumentasi:

- Mencatat semua hasil pengukuran dan penempatan patok untuk keperluan dokumentasi dan referensi.
- Menyusun laporan mengenai proses dan hasil *stake out*, termasuk gambar dan koordinat titik yang ditandai.

Koordinasi dan komunikasi:

- Menyampaikan hasil *stake out* kepada tim konstruksi dan memastikan semua pihak memahami posisi dan batas *trase* yang telah ditentukan.
- Menginformasikan pihak-pihak terkait tentang status dan hasil *stake out*.

Kepatuhan terhadap regulasi:

- Memastikan bahwa semua kegiatan *stake out* mematuhi regulasi dan standar keselamatan yang berlaku.

Dengan mengikuti ruang lingkup ini, pekerjaan *stake out* dapat dilakukan secara efektif, sehingga mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur cetak sawah.

c. Pekerjaan Pembuatan *Direksi Keet* / Bedeng Kerja

Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan pembuatan *direksi keet* atau bedeng kerja mencakup serangkaian kegiatan yang dirancang untuk menciptakan area

kerja yang aman dan efisien bagi tenaga kerja di lokasi proyek dengan ukuran 30 m².

d. Pengukuran dan Pemasangan Patok

Penyedia jasa wajib melakukan persiapan lokasi berupa survey awal, pengukuran dan pemasangan patok, juga mencatat data pengukuran dan posisi patok untuk memastikan keakuratan.

Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa semua struktur atau batas lahan yang dibangun sesuai dengan rencana dan spesifikasi teknis yang ditentukan.

e. Pemasangan Papan Nama Kegiatan / Proyek

Penyedia jasa wajib membuat dan memasang papan nama kegiatan dan ditempatkan pada lokasi kegiatan.

f. Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMKK

Penyedia jasa wajib membuat sistem operasional dan menyediakan alat pelindung diri (APD) untuk pekerja sebagai jaminan terhadap keselamatan dan Kesehatan kerjanya

2) Pekerjaan *Land Clearing* dan Pekerjaan *Land Levelling*

a. Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan *land clearing* atau pembersihan lahan yang dilakukan secara mekanis dengan alat excavator. Kegiatan *land clearing* antara lain pembersihan semak belukar, penumbangan pohon yang tumbuh pada lahan, perencekan dan pengumpulan ranting, pencabutan tunggul dan pembersihan lahan (pilah kumpul bersih). Batang pohon dapat menjadi simpukan, namun tidak dibakar dan tidak dibenamkan ke dalam tanah.

b. Penyedia jasa wajib melakukan pekerjaan *land levelling* atau perataan lahan, yang dilakukan secara mekanis antara lain dengan alat excavator. Kegiatan *land leveling* antara lain: Penyisihan lapisan *top soil* (tanah pucuk), Pengikisan, penggusuran dan penimbunan tanah (*cut and fill*) untuk memperoleh lahan yang datar, pemadatan lereng talud teras, pemadatan lereng talud teras dimaksudkan untuk mencegah terjadinya erosi tanah pada lahan yang telah dibuka dan pengembalian lapisan *top soil* di atas permukaan lahan yang telah rata.

3) Pekerjaan Tanah

a. Pekerjaan Pembuatan Badan Tanggul Saluran Irigasi

Penyedia jasa wajib membuat Badan Tanggul Saluran Irigasi mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis dalam pekerjaan cetak sawah.

b. Pekerjaan Pembuatan Saluran Tersier

Penyedia jasa wajib membuat jaringan irigasi pada tingkat usahatani yang berada dalam kawasan cetak sawah dan/atau jaringan irigasi dari sumber air ke lahan sawah mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

c. Pekerjaan Galengan

Penyedia jasa membuat galengan sawah antara satu petakan lahan dengan petakan lahan lainnya dapat juga sebagai batas kepemilikan lahan antar petani dengan mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

d. Pekerjaan Jalan Usaha Tani

Penyedia jasa membuat Jalan Usaha Tani (JUT)/ jalan akses ke lokasi lahan yang akan dicetak. Material jalan dapat berasal dari tanah setempat, hasil galian saluran atau tanah lainnya di lokasi kegiatan atau dari luar lokasi kegiatan. Pembuatan jalan usahatani/akses/badan jalan berada dalam kawasan cetak sawah dengan mengikuti gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

e. Pekerjaan Pemasangan Pipa

Penyedia jasa melakukan pengadaan dan pemasangan pipa sebagai bagian dalam pengelolaan atau tata air di tingkat usaha tani. Pemasangan dan penempatan pipa sesuai dengan dimensi dan lokasi yang ditentukan dalam gambar rencana (terlampir) atau atas persetujuan PPK dan/atau Tim Teknis.

4) Pekerjaan Pengolahan Lahan

Penyedia jasa wajib menyediakan alat pengolahan lahan dan melaksanakan pengolahan lahan untuk mempersiapkan lahan hasil cetak sawah untuk siap tanam tanaman padi. Pengolahan lahan dapat dilakukan bersamaan atau setelah kegiatan konstruksi diselesaikan.

5) Pekerjaan Pelaporan.

Penyedia jasa wajib membuat laporan pekerjaan terdiri atas:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Laporan Harian sebanyak | = 3 Rangkap/ Lokasi |
| 2. Laporan Mingguan sebanyak | = 3 Rangkap/ Lokasi |
| 3. Laporan Bulanan sebanyak | = 3 Rangkap/ Lokasi |
| 4. Laporan As Built Drawing sebanyak | = 3 Rangkap/ Lokasi |
| 5. Laporan Foto Dokumentasi sebanyak | = 3 Rangkap/ Lokasi |
| 6. Pemetaan Foto Udara (Drone) sebanyak | = 1 Set/ Lokasi |

J. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Kegiatan pelaksanaan konstruksi cetak sawah tahun 2025 seluas 9.695,71 Ha yang terdiri dari 3 (tiga) paket di Kecamatan Kapuas Murung dan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

Paket	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas (ha)	Nilai HPS (Rp.)	Jangka Waktu
1	Kapas	Kapas Murung	Palingkau Baru	6120,62	153.292.209.670,98	150 Hari Kalender
			Palingkau Lama			
			Bina Sejahtera			
			Rawa Subur			
			Bina Karya			
			Saka Binjau			
2	Kapas	Kapas Murung	Sumber Mulya	2.104,94	54.961.784.432,24	120 Hari Kalender
			Bina Mekar			
3	Kapas	Kapas Barat	Sei Kayu	1.470,15	36.921.731.212,83	120 Hari Kalender
Total				9.695,71	245.175.725.316,06	

K. Jenis Pekerjaan

1. Jenis Pekerjaan Paket Nomor Satu

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)
A PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Mobilisasi dan Demobilisasi (90 Unit)	Lumpsum (La.04)	1,00 Ls
2	Stake out trase infrastruktur (baru) di lapangan	T.04.a.1	6.120,62 Ha
3	Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet / Bedeng Kerja	A.1.08.2a	180,00 M ²
4	Pengukuran dan Pemasangan Patok	U.1.2.1.e.1 (a)	1.227,00 Bh
5	Pemasangan Papan Nama Kegiatan / Proyek	U.1.3.f.2 (a)	6,00 Bh
6	Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMKK	LA05	1,00 Ls
B PEKERJAAN LAND CLEARING DAN LAND LEVELLING			
1	Pembersihan Lapangan dan Perataan	U.3.1.b (a)	61.206.200,00 M ²
C PEKERJAAN TANAH			
1	Pekerjaan Pembuatan Badan Tanggul Saluran Irigasi	A.3.02.1d.2	1.044.667,02 M ³
2	Pekerjaan Pembuatan Saluran Tersier	A.3.02.2b.2	676.399,26 M ³
3	Pekerjaan Pembuatan Pembuatan Galangan	A.3.02.1d.2	217.823,84 M ³
4	Pemasangan Pipa PVC Ø 200 mm (8")		
	a. Pemasangan 1m pipa PVC Ø 200 mm (8")	6.4.1.12	7.615,00 M'
	b. Pemasangan Knee PVC Ø 200 mm (8")	6.4.1.12.a	1.523,00 Bh
D PEKERJAAN PENGOLAHAN LAHAN.			
1	Pekerjaan Pengolahan Lahan	Lumpsum	6.120,62 Ha
E PEKERJAAN PELAPORAN			
1	Pembuatan Laporan Harian	Lumpsum	18,00 Buku
2	Pembuatan Laporan Mingguan	Lumpsum	18,00 Buku
3	Pembuatan Laporan Bulanan	Lumpsum	18,00 Buku
4	Pembuatan Laporan As Built Drawing	Lumpsum	18,00 Buku
5	Pembuatan Laporan Foto Dokumentasi	Lumpsum	18,00 Buku
6	Pemetaan Foto Udara (Drone)	Lumpsum	6.120,62 Ha

2. Jenis Pekerjaan Paket Nomor 2

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)
A PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Mobilisasi dan Demobilisasi (37 Unit)	Lumpsum (La.04)	1,00 Ls
2	Stake out trase infrastruktur (baru) di lapangan	T.04.a.1	2.104,94 Ha
3	Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet / Bedeng Kerja	A.1.08.2a	60,00 M ²
4	Pengukuran dan Pemasangan Patok	U.1.2.1.e.1 (a)	421,37 Bh
5	Pemasangan Papan Nama Kegiatan / Proyek	U.1.3.f.2 (a)	2,00 Bh
6	Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK	LA05	1,00 Ls
B PEKERJAAN LAND CLEARING DAN LAND LEVELLING			
1	Pembersihan Lapangan dan Perataan	U.3.1.b (a)	21.049.400,00 M ²
C PEKERJAAN TANAH			
1	Pekerjaan Pembuatan Badan Tanggul Saluran Irigasi	A.3.02.1d.2	317.750,26 M ³
2	Pekerjaan Pembuatan Saluran Tersier	A.3.02.2b.2	221.963,61 M ³
3	Pekerjaan Pembuatan Pembuatan Galengan	A.3.02.1d.2	55.458,47 M ³
4	Pemasangan Pipa PVC Ø 200 mm (8")		
	a. Pemasangan 1m pipa PVC Ø 200 mm (8")	6.4.1.12	7.526,00 M'
	b. Pemasangan Knee PVC Ø 200 mm (8")	6.4.1.12.a	1.965,00 Bh
D PEKERJAAN PENGOLAHAN LAHAN.			
1	Pekerjaan Pengolahan Lahan	Lumpsum	2.104,94 Ha
E PEKERJAAN PELAPORAN			
1	Pembuatan Laporan Harian	Lumpsum	6,00 Buku
2	Pembuatan Laporan Mingguan	Lumpsum	6,00 Buku
3	Pembuatan Laporan Bulanan	Lumpsum	6,00 Buku
4	Pembuatan Laporan As Built Drawing	Lumpsum	6,00 Buku
5	Pembuatan Laporan Foto Dokumentasi	Lumpsum	6,00 Buku
6	Pemetaan Foto Udara (Drone)	Lumpsum	2.104,94 Ha

3. Jenis Pekerjaan Paket Nomor 3

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)
A PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Mobilisasi dan Demobilisasi (29 Unit)	Lumpsum (La.04)	1,00 Ls
2	Stake out trase infrastruktur (baru) di lapangan	T.04.a.1	1.470,15 Ha
3	Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet / Bedeng Kerja	A.1.08.2a	210,00 M ²
4	Pengukuran dan Pemasangan Patok	U.1.2.1.e.1 (a)	2.940,30 Bh
5	Pemasangan Papan Nama Kegiatan / Proyek	U.1.3.f.2 (a)	7,00 Bh
6	Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMKK	LA05	1,00 Ls
B PEKERJAAN LAND CLEARING DAN LAND LEVELLING			
1	Pembersihan Lapangan dan Perataan	U.3.1.b (a)	14.701.493,27 M ²
C PEKERJAAN TANAH			
1	Pekerjaan Pembuatan Badan Tanggul Saluran Irigasi	A.3.02.1d.2	67.001,51 M ³
2	Pekerjaan Pembuatan Saluran Tersier	A.3.02.2b.2	14.005,20 M ³
3	Pekerjaan Pembuatan Pembuatan Galengan	A.3.02.1d.2	9.861,12 M ³
4	Pekerjaan Pembuatan Pembuatan Jalan Usaha Tani	A.3.02.1d.2	13.695,56 M ³
5	Pemasangan Pipa PVC Ø 200 mm (8")		
	a. Pemasangan 1m pipa PVC Ø 200 mm (8")	6.4.1.12	8.800,83 M'
	b. Pemasangan Knee PVC Ø 200 mm (8")	6.4.1.12.a	3.461,22 Bh
D PEKERJAAN PENGOLAHAN LAHAN.			
1	Pekerjaan Pengolahan Lahan	Lumpsum	1.470,15 Ha
E PEKERJAAN PELAPORAN			
1	Pembuatan Laporan Harian	Lumpsum	3,00 Buku
2	Pembuatan Laporan Mingguan	Lumpsum	3,00 Buku
3	Pembuatan Laporan Bulanan	Lumpsum	3,00 Buku
4	Pembuatan Laporan As Built Drawing	Lumpsum	3,00 Buku
5	Pembuatan Laporan Foto Dokumentasi	Lumpsum	3,00 Buku
6	Pemetaan Foto Udara (Drone)	Lumpsum	1.470,15 Ha

Palangka Raya, 24 Januari 2025

Pejabat Pembuat Komitmen,



[Signature]
Febrita Robina, S.TP

NIP. 19760410 200501 2 011